



PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2021



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah selesai disusun.

Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah untuk mengevaluasi secara keseluruhan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat serta untuk mempertanggungjawabkan sekaligus menjadi masukan dalam menyusun dan menyempurnakan program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Besar harapan Kami laporan yang jauh dari sempurna ini dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan APBD yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2021, dan menjadi bahan dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Padang, Januari 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,



MEDI ISWANDI, ST, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19750502 199903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Ruang Lingkup.....	2
1.4. Gambaran Organisasi	2
1.4.1. Dasar Pembentukan Organisasi.....	2
1.4.2. Tugas Pokok Dan Fungsi	3
1.4.3. Struktur Organisasi	8
1.4.4. Cascading Kinerja	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2021	14
2.1. Tujuan dan Sasaran	14
2.1.1. Tujuan.....	14
2.1.2. Sasaran	15
2.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	16
BAB III CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI TAHUN 2021	25
3.1. Capaian Indikator Kinerja.....	25
3.2. Realisasi Penyerapan Anggaran	29
3.3. Kendala dan Permasalahan	51
3.4. Penghargaan Tahun 2021	51
BAB IV PENUTUP.....	53
4.1. Kesimpulan.....	53
4.2. Rekomendasi	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	15
Tabel 2.2 Program Kerja Tahun Anggaran 2021	16
Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Tahun 2021 .	16
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	25
Tabel 3.5 Realisasi Serapan Anggaran Per Sub Kegiatan Tahun 2021	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda.....	9
Gambar 1.2 Cascading Bappeda Provinsi Sumatera Barat.....	10
Gambar 1.3 Cascading I Bappeda	11
Gambar 1.4 Cascading II Bappeda	12
Gambar 3.5 Grafik Persentase Alokasi Anggaran Per program Tahun Anggaran 2021	30
Gambar 3.6 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Terhadap DPA Tahun Anggaran 2021 Per Program	30
Gambar 3.7 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Terhadap DPA Tahun Anggaran 2021 Per Bidang Bappeda Provinsi Sumatera Barat	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah khususnya dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah dengan tugas pokok sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi, Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2021 Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 26.210.544.895,-. Kemudian pada bulan November 2021 ditetapkan anggaran perubahan melalui Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tanggal 9 November 2021, sehingga alokasi dana untuk Bappeda Provinsi Sumatera Barat menjadi Rp. 23.158.801.521,-. Hasil akhir yang diharapkan dari ketersediaan anggaran tersebut adalah meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan terutama didukung dengan ketersediaan dokumen perencanaan yang berkualitas.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, maka disusunlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2021 ini berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang ada pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2021 ini adalah untuk mengevaluasi secara keseluruhan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk :

1. Memberikan penilaian terhadap kinerja yang dilaksanakan masing-masing bidang sebagai evaluasi dari kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian

sasaran program operasional tahunan yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya dan dana yang disediakan.

3. Bahan masukan dalam menyusun dan menyempurnakan program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun berikutnya.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2021 ini mempunyai batasan-batasan sebagai berikut :

1. Tujuan dan arah pembangunan, langkah-langkah strategis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan program kerja tahun 2021.
2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
3. Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pemecahan masalah tersebut.
4. Rekomendasi tindak lanjut diperlukan sebagai acuan pokok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada tahun berikutnya.

1.4. Gambaran Organisasi

1.4.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Struktur susunan organisasi Bappeda adalah sebagai berikut :

- A. Kepala Badan
- B. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Program.
 3. Sub Bagian Keuangan.
- C. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan.
 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Sub Bidang Data dan Informasi.
- D. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemerintahan.
 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia.

3. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- E. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 1. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi.
 2. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
 3. Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- F. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 2. Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
 3. Sub Bidang Infrastruktur Keciptakayaan dan Kewilayahan.
- G. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Bappeda Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tugas Pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah.
5. Pelaksanaan administrasi Badan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan uraian sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen perencanaan jangka panjang daerah 20 tahunan (RPJPD), dokumen jangka menengah daerah 5 tahunan (RPJMD) dan dokumen jangka pendek tahunan (RKPD).
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Menyelenggarakan fasilitasi dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD) dan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten/Kota.
4. Menyelenggarakan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (RKPD) Kabupaten/Kota.

5. Menyusun Rencana Strategis dan Program Kerja Badan.
6. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan.
7. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Bappeda.
8. Mengkoordinir Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.
9. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan stakeholder urusan pemerintahan Nasional, regional dan Daerah di bidang perencanaan.
10. Menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan.
11. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Kepala Badan membawahi Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta kelompok jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat Badan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di internal Badan.
2. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan.
3. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di internal Badan.
4. Penyelenggaraan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Badan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi internal Badan.
6. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Badan.
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Badan.
8. Penyelenggaraan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Badan.
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,

memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
2. Penyelenggaraan pengumpulan dan analisa data informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
3. Penyelenggaraan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
4. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
5. Penyelenggaraan Pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD.
6. Penyelenggaraan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah
7. Penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan Daerah.
8. Penyelenggaraan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan Daerah.
9. Penyelenggaraan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.
10. penyelenggaraan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah.
11. Penyelenggaraan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah.
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
2. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

3. Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD.
 4. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
 5. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 6. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 7. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 8. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 9. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 10. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 11. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 12. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, industri, perdagangan, investasi, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pariwisata dan koperasi serta usaha kecil dan menengah, dengan fungsi sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 2. Penyelenggaraan koordinasi bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (Perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif.

3. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 4. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 5. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 6. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 7. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 8. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 9. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 10. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 11. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 12. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan dan Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan, dengan fungsi sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 2. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 3. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

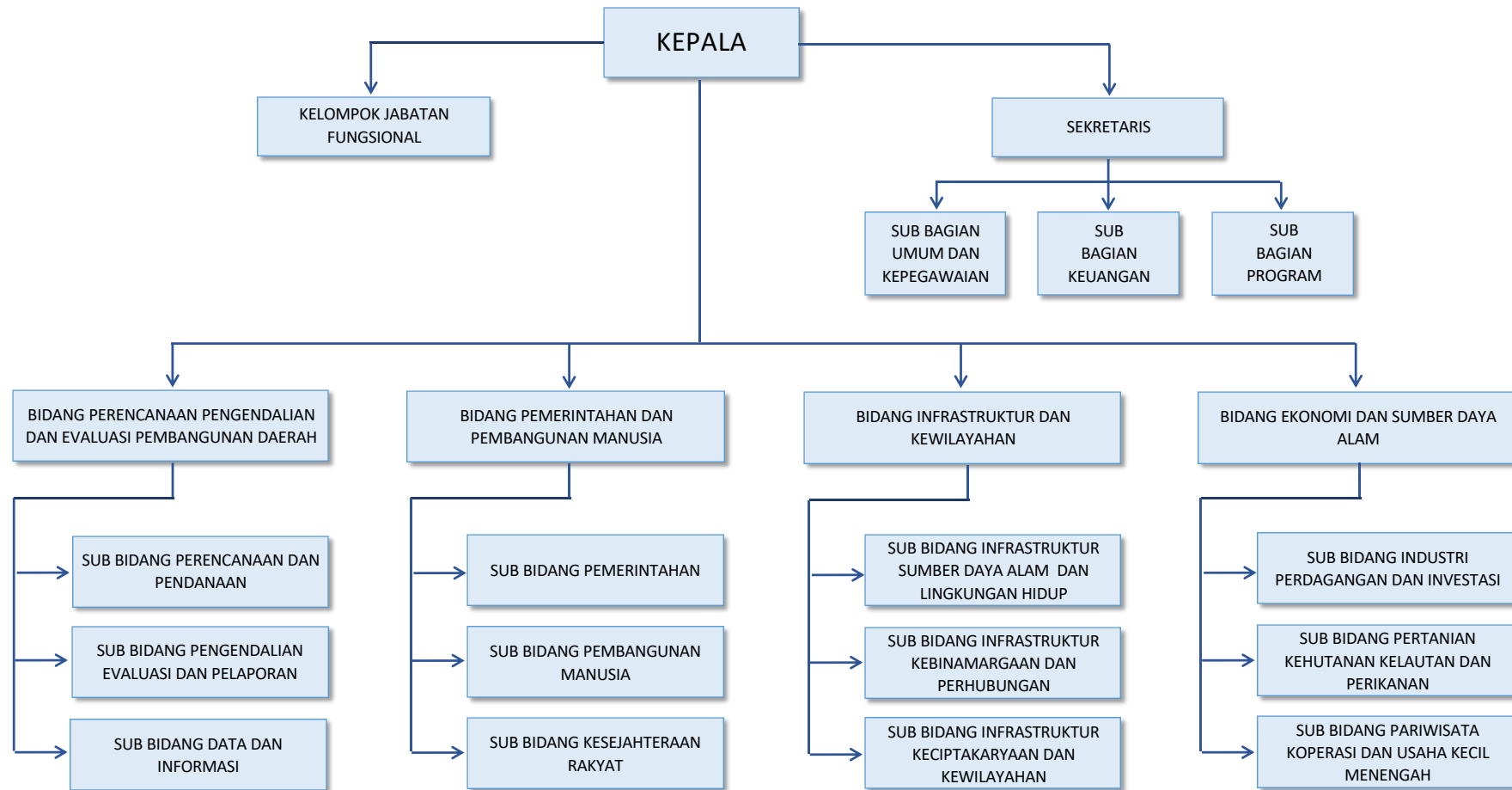
4. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 5. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 6. Penyelenggaraan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW.
 7. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 8. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 9. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 10. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 11. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 12. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi dengan komposisi jabatan struktural yang terdiri atas :

- a. Jabatan Kepala Badan, Eselon II.a
- b. Jabatan Sekretaris dan Jabatan Kepala Bidang, Eselon III.a
- c. Jabatan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, Eselon IV.a
- d. Jabatan Fungsional Perencana

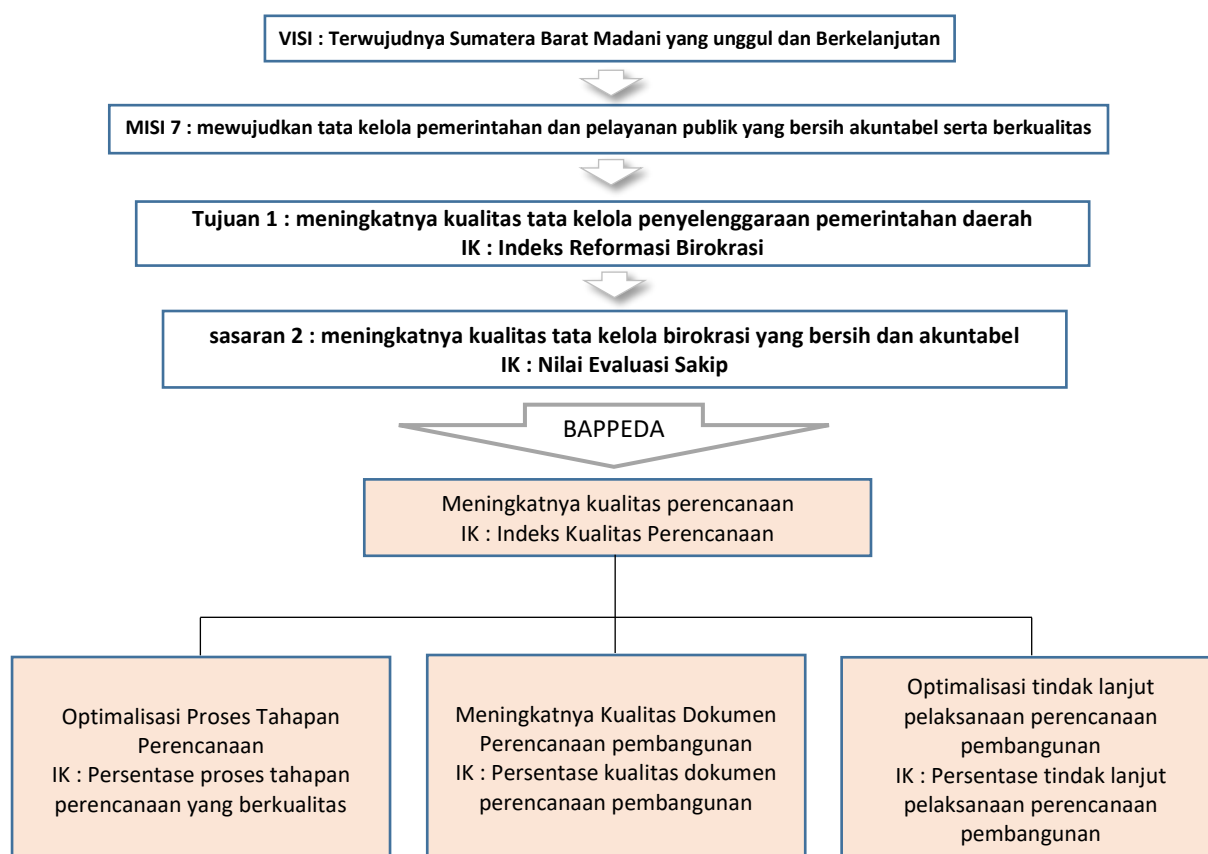
Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

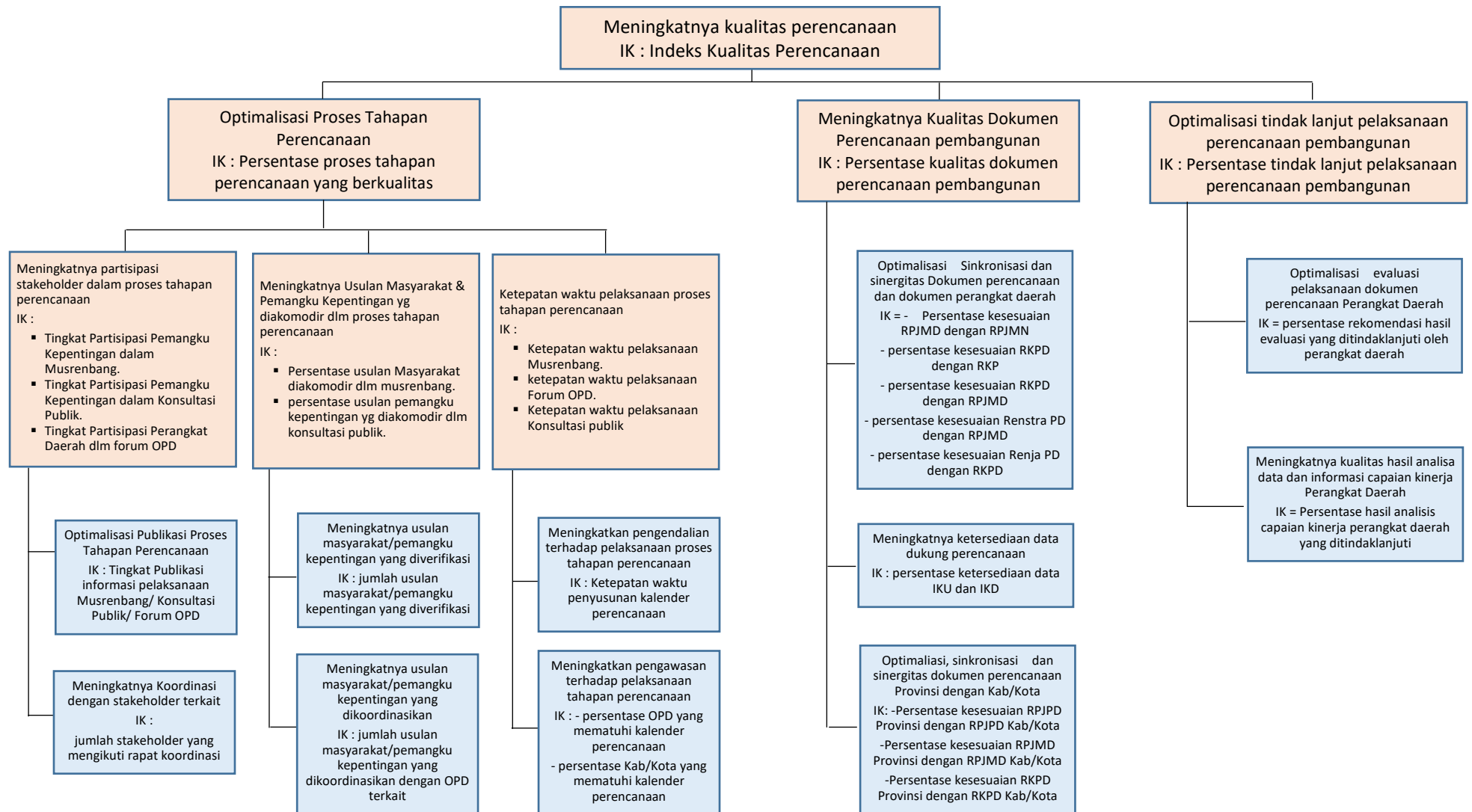
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda

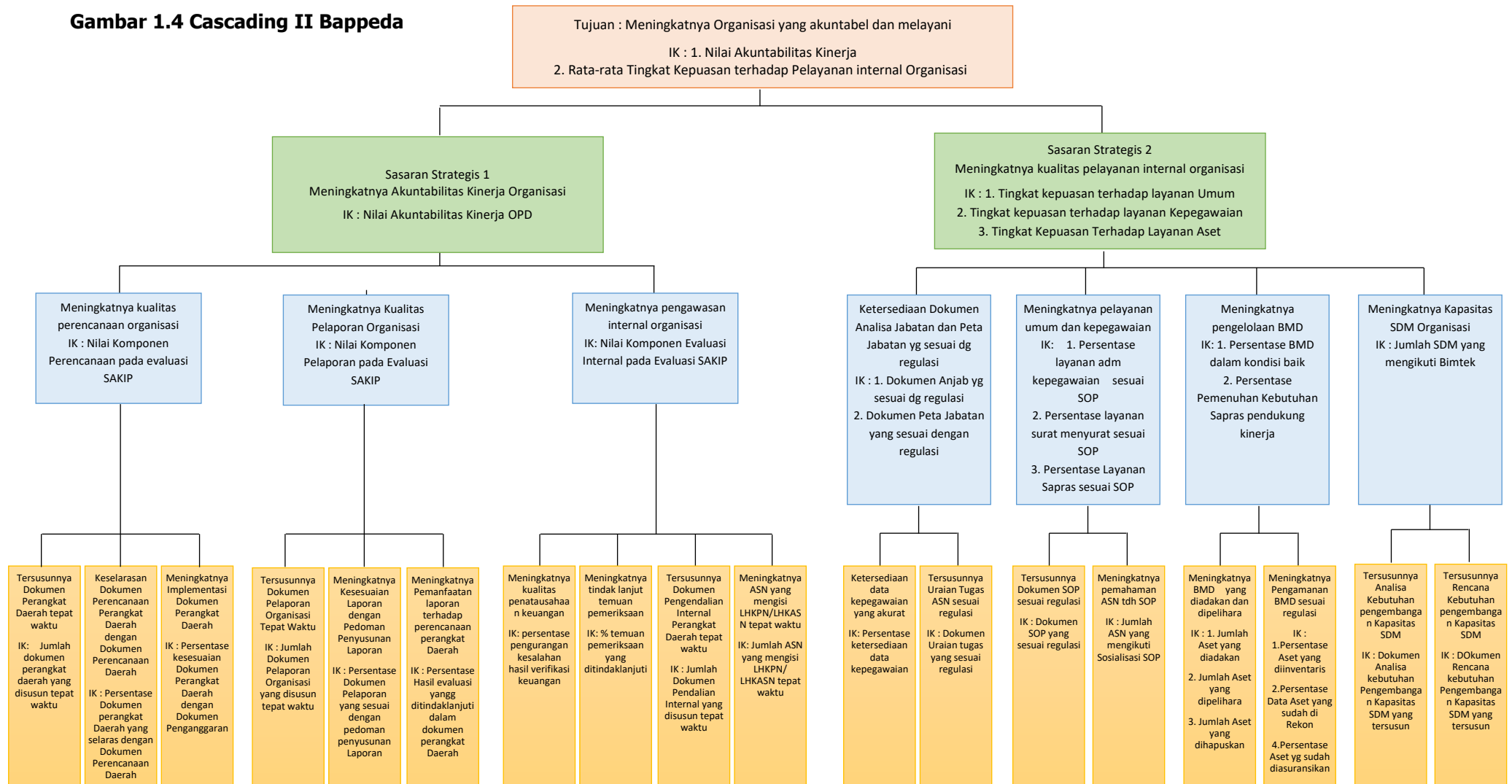
1.4.4. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan skema kinerja yang digambarkan melalui cascading sebagai berikut :

Gambar 1.2. Cascading Bappeda Provinsi Sumatera Barat



Gambar 1.3 Cascading I Bappeda

Gambar 1.4 Cascading II Bappeda

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Tahunan ini adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2021 yang memuat dasar hukum dibentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat beserta tugas pokok dan fungsinya, Maksud dan Tujuan Laporan, Ruang lingkup penyusunan laporan disertai dengan batasan-batasan penulisan laporan agar lebih terarah, Gambaran Organisasi yang menggambarkan struktur organisasi beserta fungsinya yang juga dijabarkan dalam cascading kinerja, serta Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021

Bagian ini menguraikan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 yang telah tertuang dalam dokumen Renja 2021 yang meliputi Tujuan dan Sasaran serta Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB III Capaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2021

Bagian ini menguraikan capaian indikator kinerja, realisasi penyerapan anggaran, kendala dan permasalahan dan penghargaan yang diterima pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai target kinerja pembinaan yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama tahun anggaran 2021.

BAB II

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2021

2.1. Tujuan dan Sasaran

2.1.1. Tujuan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat di bidang perencanaan pembangunan, maka tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah:

1. Terwujudnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Terwujudnya Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas (KISS) dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan profesionalisme aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan tersebut didasarkan kepada isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang telah dirumuskan di dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 yaitu :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapabilitas SDM perencana.
2. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.
3. Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, serta konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Optimalisasi hasil pengendalian dan evaluasi menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
5. Optimalisasi pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan

Dengan demikian rumusan tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu : 1) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan 2) Meningkatnya Kinerja Organisasi akan dapat tercapai. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas lebih lanjut akan dijabarkan kedalam bentuk perencanaan teknis/mikro oleh masing-masing bidang dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama tahun 2021.

2.1.2. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah :

1. Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya pembinaan, fasilitasi dan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
4. Penggunaan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan.
5. Meningkatnya pengelolaan organisasi.

Sasaran tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang selanjutnya ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2021 dan telah dilakukan perubahan pada tanggal 16 November 2021 sehubungan adanya perubahan anggaran akibat pandemi COVID-19. Adapun sasaran strategis yang telah dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	1.1	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan • Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra • Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja • Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPd • Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPd dengan KUA PPAS	100%
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	2.1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (72,59)

Tabel 2.2 Program Kerja Tahun Anggaran 2021

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.692.041.639	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.549.446.189	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6.917.313.693	APBD

2.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 didasarkan kepada upaya pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Penyusunan program dan kegiatan ini tidak terlepas dari pencapaian visi misi Gubernur yang tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Pada Tahun 2021, Bappeda Provinsi Sumatera Barat merencanakan 3 program, yaitu (1) Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, (2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan (3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan 14 kegiatan dan 78 sub kegiatan. Namun pada Perubahan Anggaran Tahun 2021 dilakukan efisiensi yaitu rasionalisasi anggaran dan pengurangan sub kegiatan menjadi 73 Sub Kegiatan. Adapun lima Sub Kegiatan yang dihilangkan dalam Perubahan Anggaran adalah :

1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
3. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
4. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
5. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah

Pengurangan sub kegiatan ini disebabkan substansinya yang telah ada pada sub kegiatan lainnya sehingga dinilai tidak efisien.

Adapun ruang lingkup kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Anggaran Perubahan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Tahun 2021

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	3 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 dokumen
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 dokumen
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	84 orang
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 orang
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	109 Dokumen (24 Pengesahan SPJ, 85 SPP dan SPM)
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 Laporan
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	3 laporan
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 laporan
III.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	4 dokumen
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah	12 unit
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited)	4 dokumen
17	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 dokumen
IV.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	87 Stel
19	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	2 Kali
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan diikuti	2 Kali
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	-
V.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25 Jenis
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Jenis
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 jenis
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	81 Jenis
26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 jenis

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 jenis
28	Fasilitasi Kunjungan Tamu *	Jumlah tamu yang difasilitasi	
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	1 Laporan
30	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan.	4 Orang
VI.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%
31	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3 Jenis
32	Pengadaan Aset Tetap Lainnya *	Jumlah Aset Tetap Lainnya baru	
VII.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	4.800 Surat
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	2550 meter kubik 100 mbps 12 Bulan 245.000 KVA 8 rekening
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	24 orang
VIII.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54 unit
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (atau sebutkan nama gedung/bangunannya yang dipelihara)	1 unit
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	42 unit
IX.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	3 dokumen
41	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 dokumen
42	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	- Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya - Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan SDGs 2021 - 2026	1 dokumen 1 Dokumen
43	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Kosultasi publik yang dilaksanakan	1 Dokumen Berita Acara
44	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD *	Forum Perangkat Daerah yang dikoordinir	
45	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 Dokumen Berita Acara
46	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan	4 dokumen

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
X.	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen
47	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen
48	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	1 dokumen
49	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota yang mendukung Indikator Pembangunan Provinsi	1 Dokumen
50	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	1 Dokumen
XI.	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	75%
51	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 Dokumen
52	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah *	Laporan pelaksanaan kerjasama daerah	-
53	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	3 laporan
54	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	72 dokumen
XII.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 Dokumen

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
55	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.	3 dokumen
56	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	5 rumusan
57	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan
58	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 Laporan
59	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 dokumen
60	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Rumusan
61	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan
62	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
XIII	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 dokumen
63	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 Dokumen
64	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	5 Rumusan
65	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan
66	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 laporan
67	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3 Dokumen
68	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	5 Rumusan
69	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	1 laporan
70	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah hasil sinergitas Bidang Sumber Daya Alam.	1 laporan
XIV	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	3 Dokumen

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
		Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
71	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3 dokumen
72	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	5 rumusan
73	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan
74	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 laporan
75	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3 Dokumen
76	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	5 Rumusan
77	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 laporan
78	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan

Catatan : *Sub Kegiatan yang dihilangkan pada Anggaran Perubahan TA 2022

BAB III

CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI TAHUN 2021

3.1. Capaian Indikator Kinerja

Sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat meliputi 2 (dua) sasaran dengan masing-masing indikator kinerja, Hingga akhir tahun anggaran capaian sasaran kinerja telah mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Capaian
1.	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan • Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra • Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja • Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD • Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	100%	100%
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (72,59)	BB (74,90)

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat diukur melalui 2 sasaran dengan capaian sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, dengan indikator kinerja Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan dengan target 100% yang diukur melalui :
 - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra
 - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dan Renja
 - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD
 - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS

Upaya-upaya yang telah dilakukan sehingga target pada indikator ini dapat mencapai 100% antara lain :

- Mengoptimalkan pelaksanaan Musrenbang RKPD dan RPJMD
- Melakukan orientasi penyamaan pemahaman dan persepsi dalam Penyusunan sasaran dan indikator sasaran dalam RPJMD dengan penyusunan Cascading.
- Mengoptimalkan pelaksanaan Verifikasi Renstra Perangkat Daerah untuk melihat keselarasan dan konsistensi sasaran, indikator sasaran serta program dan indikator program antara RPJMD dengan Renstra.
- Mengoptimalkan verifikasi Renja Perangkat Daerah untuk melihat keselarasan dan konsistensi sasaran, indikator sasaran serta program beserta indikator program antara Renja, RKPD dengan RPJMD.
- Merumuskan definisi operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Program pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah guna menjaga konsistensi perencanaan dan panganggaran serta sebagai pegangan semua pihak dalam pelaksanaan dan monitoring.

Upaya-upaya ini telah diwujudkan melalui pelaksanaan 2 (dua) program dengan 6 (enam) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, yaitu :

- a. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Melalui program ini, sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 telah dilaksanakan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan sub kegiatan :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

3) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan sasaran meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Melalui program ini, sampai dengan akhir tahun anggaran telah dilaksanakan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan :
 - Analisa Kondisi Daerah, Permasalahan Dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.
 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
- 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota
 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
- 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi.
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
 - Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target nilai BB (72,59). Indikator kinerja ini dapat dicapai 100%, dimana pada tahun 2021 nilai pelaporan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Nomor : 04.20/INSP-LAKIP/III-2021 tanggal 30 Maret 2021 memperoleh nilai 74,90% dengan kategori BB.

Guna mencapai target sasaran Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, sampai dengan akhir tahun 2021 telah dilakukan beberapa upaya antara lain :

- a. Menyempurnakan cascading kinerja Bappeda

- b. Menyusun Renstra yang selaras dengan RPJMD
- c. Membuat Peta Proses Bisnis sesuai dengan Renstra
- d. Menerapkan e-kinerja

Upaya-upaya ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan sasaran program yaitu terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. Program ini didukung oleh 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan.

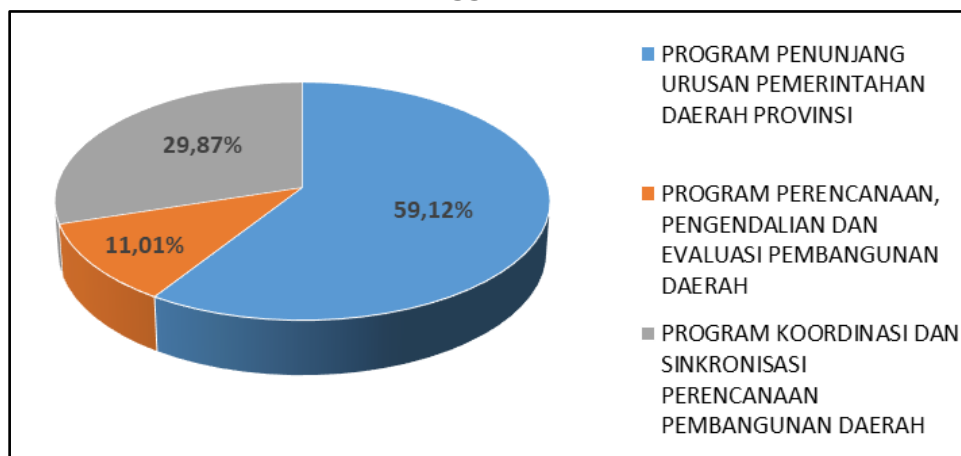
3.2. Realisasi Penyerapan Anggaran

Realisasi Serapan Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Barat hingga akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 22.543.092.512,- atau sebesar 97,34 % dari total DPA Tahun A 2021 sebesar Rp. 23.158.801.521,-. Kemajuan realisasi keuangan tersebut tersebar dalam tiga program yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang merupakan program dengan porsi anggaran paling besar, sekitar 59,12 % dari total Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2021, memiliki realisasi keuangan sebesar 98,54% atau sebesar Rp. 13.491.836.394,-. Porsi anggaran ini didominasi oleh sub kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik serta sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, yang realisasi masing-masing sub-kegiatan tersebut diatas 98 %. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan porsi anggaran paling kecil, yaitu 11,01% dari total Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2021, memiliki realisasi keuangan sebesar 99,37% atau sebesar Rp. 2.533.415.648,-. Porsi anggaran terbesar pada program ini adalah sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan sub kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan porsi anggaran sebesar 29,87% dari total Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2021, memiliki realisasi keuangan sebesar 94,23% atau sebesar Rp. 6.517.840.470,-. Porsi anggaran terbesar pada program ini adalah pada sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Program ini dilaksanakan

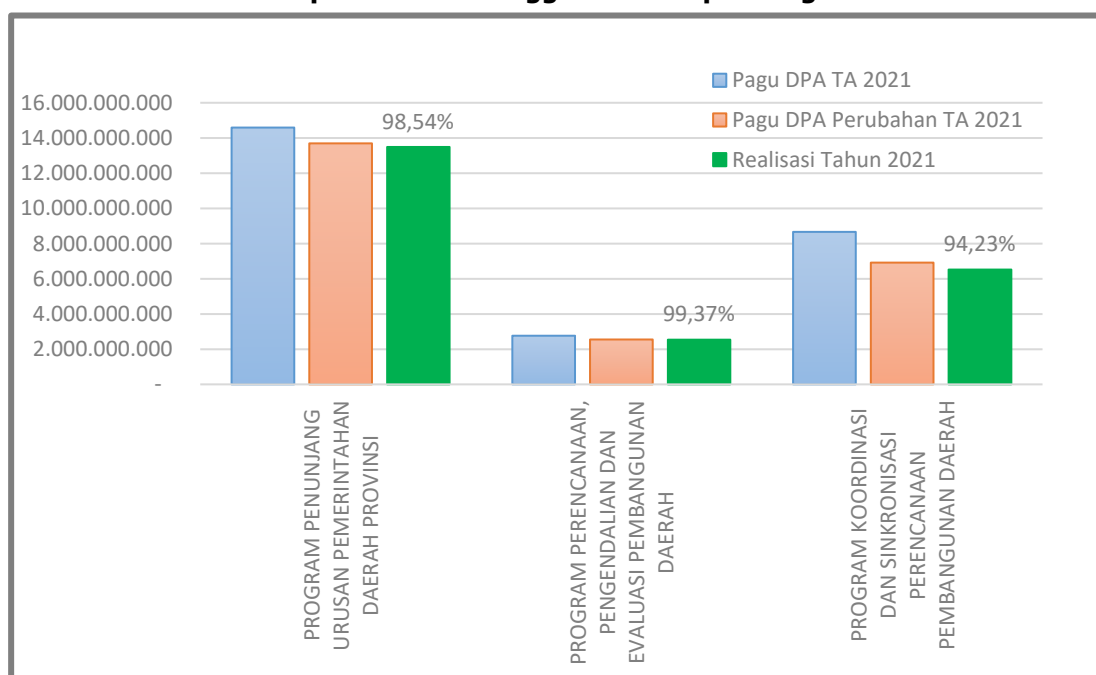
oleh tiga bidang yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomi dan Sumber Daya Alam dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang masing-masing bidang melaksanakan satu kegiatan dengan beberapa subkegiatan.

Gambar 3.5 Grafik persentase alokasi anggaran per program Tahun Anggaran 2021

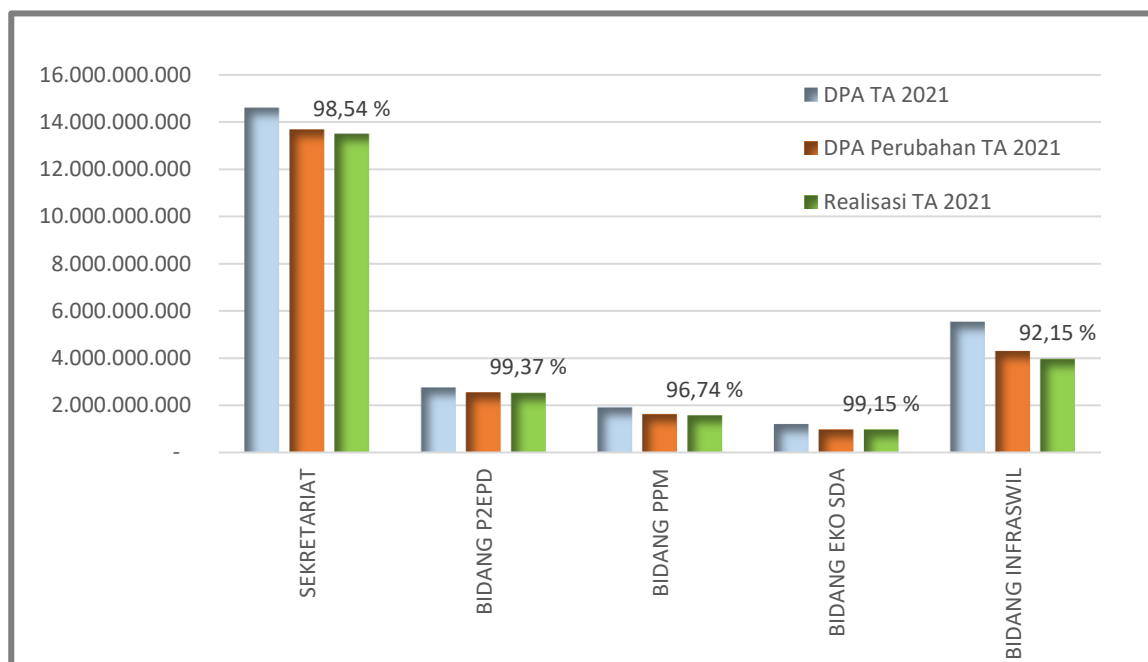


Realisasi keuangan masing-masing program dapat dilihat pada Gambar 3.5 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Terhadap DPA Tahun Anggaran 2021 per Program, dan untuk perbandingan realisasi keuangan pada masing-masing bidang dapat dilihat pada Gambar 3.6 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan terhadap DPA Tahun Anggaran 2021 Per Bidang Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 3.6 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Terhadap DPA Tahun Anggaran 2021 per Program



Gambar 3.7 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Terhadap DPA Tahun Anggaran 2021 per Bidang Bappeda Provinsi Sumatera Barat



Jika dilihat kemajuan realisasi keuangan per bidang-bidang yang ada di Bappeda Provinsi Sumatra Barat Tahun Anggaran 2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat, dengan anggaran pada DPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 13.692.041.639,-, telah direalisasikan sebesar Rp. 13.491.836.394,- atau sebesar 98,54 %.
2. Bidang Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD), dengan anggaran pada DPA Tahun 2021 sebesar Rp. 2.549.446.189,-, telah direalisasikan sebesar Rp. 2.533.415.648,- atau sebesar 99,37%.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan anggaran pada DPA Tahun 2021 sebesar Rp. 1.627.533.710,-, telah direalisasikan sebesar Rp. 1.574.451.740,- atau sebesar 96,74%.
4. Bidang Perekonomi dan Sumber Daya Alam dengan anggaran pada DPA Tahun 2021 sebesar Rp. 985.864.535,-, telah direalisasikan sebesar Rp. 977.464.605,- atau sebesar 99,15%.
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan anggaran pada DPA Tahun 2021 sebesar Rp. 4.303.915.448,-, telah direalisasikan sebesar Rp. 3.965.924.125,- atau sebesar 92,15%.

Potret serapan anggaran berdasarkan masing-masing sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Serapan Anggaran Per Subkegiatan Tahun 2021

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.1	PERENCANAAN			23.158.801.521		22.543.092.512		97,34
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	13.692.041.639	100 %	13.491.836.394	100,00	98,54
5.1.1.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	387.984.160	100 %	386.223.769	100,00	99,55
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	3 dokumen	317.595.130	3 dokumen	317.080.969	100,00	99,84
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	7.009.040	1 dokumen	6.791.400	100,00	96,89
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	7.931.540	1 dokumen	7.719.400	100,00	97,33
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	7.609.040	1 dokumen	7.550.400	100,00	99,23
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	7.956.090	1 dokumen	7.848.800	100,00	98,65

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 dokumen	22.846.830	4 dokumen	22.497.800	100,00	98,47
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 dokumen	17.036.490	4 dokumen	16.735.000	100,00	98,23
5.1.1.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	8.659.209.225	100 %	8.566.864.944	100,00	98,93
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	84 orang	8.318.238.825	84 orang	8.228.752.244	100,00	98,92
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 orang	263.204.000	22 orang	261.144.400	100,00	99,22
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	109 dokumen (24 Pengesahan SPJ, 85 SPP dan SPM)	20.335.000	109 dokumen (24 Pengesahan SPJ, 85 SPP dan SPM)	19.966.400	100,00	98,19
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 laporan	9.589.000	1 laporan	9.572.800	100,00	99,83

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	3 laporan	10.280.000	3 laporan	10.134.900	100,00	98,59
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 laporan	37.562.400	13 laporan	37.294.200	100,00	99,29
5.1.1.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	144.150.176	100 %	143.007.646	100,00	99,21
5.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	4 dokumen	1.837.044	4 dokumen	1.835.300	100,00	99,91
5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah	12 unit	108.400.000	12 unit	107.283.146	100,00	98,97
5.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited)	4 dokumen	14.357.132	4 dokumen	14.350.200	100,00	99,95

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 dokumen	19.556.000	1 dokumen	19.539.000	100,00	99,91
5.1.1.1.04	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	83.720.032	100 %	83.312.550	100,00	99,51
5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	88 stel	65.250.000	88 stel	64.902.000	100,00	99,47
5.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	2 Kali	12.566.032	2 Kali	12.520.550	100,00	99,64
5.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan diikuti	2 kali	5.904.000	2 kali	5.890.000	100,00	99,76
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	ASN Bappeda yang mengikuti Bimtek	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.03	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi Umum	100 %	2.194.214.397	9 Bulan	2.118.225.750	100,00	96,54
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25 Jenis	19.919.000	25 Jenis	19.914.200	100,00	99,98

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 jenis	777.030.504	12 jenis	718.704.370	100,00	92,49
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 jenis	37.718.300	20 jenis	37.492.700	100,00	99,40
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	81 Jenis	305.132.020	81 Jenis	292.517.580	100,00	95,87
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 jenis	17.622.353	10 jenis	17.622.250	100,00	100,00
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 jenis	10.501.920	6 jenis	10.500.000	100,00	99,98
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Jumlah tamu yang dilayani	-	-	-	-	-	-
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	1 Laporan	766.290.300	1 Laporan	761.474.650	100,00	99,37

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	▪ Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. ▪ Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	4 Orang	260.000.000	4 Orang	260.000.000	100,00	100,00
5.1.1.1.03	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	104.771.400	100 %	100.979.000	100,00	96,38
5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3 jenis	104.771.400	3 Jenis	100.979.000	100,00	96.38
5.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya*	Aset Tetap Lainnya yang diadakan	-	-		-	-	-
5.1.1.1.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.606.274.999	100 %	1.590.113.744	100,00	98,99
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	4.800 surat	7.500.000	4.800 surat	7.500.000	100,00	100.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	▪ Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. ▪ Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. ▪ Jumlah tagihan lisensi zoom meeting yang dibayarkan ▪ Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan ▪ Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	2550 m ³	704.855.000	2550 m ³	694.540.939	100,00	98,54
			100 mbps		100 mbps			
			12 bulan		12 bulan			
			245000 KVA		245000 KVA			
			8 rekening		8 rekening			
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	24 orang	893.919.999	24 orang	888.072.805	100,00	99,35
5.1.1.1.03	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	511.717.250	100 %	503.108.991	100,00	98,32
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	37.271.000	1 Unit	37.088.864	100,00	99,51

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	186.500.000	10 unit	182.734.127	100,00	97,98
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54 unit	74.400.000	54 unit	72.300.500	100,00	97,18
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	178.736.250	1 unit	178.606.000	100,00	99,93
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	42 unit	34.810.000	42 unit	32.379.500	100,00	93,02
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	80 %	2.549.446.189	80%	2.533.415.648	100,00	99,37
5.01.02.1.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	3 dokumen	1.365.724.408	3 Dokumen	1.360.815.026	100,00	99,64

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 dokumen	14.828.100	1 dokumen	14.755.400	100,00	99,51
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	- Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya. - Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan SDGs 2021-2026.	1 dokumen 1 dokumen	58.238.000	1 dokumen 1 dokumen	57,630,300	100,00	98,96
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	88.544.000	1 dokumen Berita Acara	88,209,100	100,00	99,62
5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	292.042.400	1 dokumen Berita Acara	290.543,800	100,00	99,49
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	4 dokumen	912.071.908	4 dokumen	909.676.426	100,00	99,74
5.01.02.1.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	394.348.220	-	392.049.372	100,00	99,42
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	217.525.950	1 dokumen	216.761.372	100,00	99,65
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	1 dokumen	61.615.450	1 dokumen	61.218.700	100,00	99,36

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota yang mendukung Indikator Pembangunan Provinsi	1 dokumen	47.599.098	1 dokumen	47.355.700	100,00	99,49
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun.	1 dokumen	67.607.722	1 dokumen	66.713.600	100,00	98,68
5.01.02.1.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	75 %	789.373.561	75 %	780.551.250	100,00	98,88
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	90.508.071	2 dokumen	86.896.100	100,00	96,01
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah*	Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	-	-	-	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.	3 laporan	53.028.090	3 laporan	51.635.050	100,00	97,37
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	72 dokumen	645.837.400	72 dokumen	642.020.100	100,00	99,41
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi	85 %	6.917.313.693	85 %	6.517.840.470	100,00	94,23
5.01.03.1.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 dokumen	1.627.533.710	3 dokumen	1.574.451.740	100,00	96,74

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3 dokumen	176.643.250	3 dokumen	174.030.443	100,00	98,52
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	5 rumusan	208.426.000	5 rumusan	208.140.900	100,00	99,86
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	6.654.150	1 laporan	6.440.050	100,00	96,78
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	46.619.250	1 laporan	45.885.050	100,00	98,43

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 dokumen	312.591.110	3 dokumen	288.627.769	100,00	92,33
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	5 rumusan	522.960.000	5 rumusan	503.708.800	100,00	96,32
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	17.566.500	1 laporan	15.914.500	100,00	90,60
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	336.073.450	1 laporan	331.704.228	100,00	98,70

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 dokumen	985.864.535	3 dokumen	977.464.605	100,00	99,15
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 dokumen	185.483.000	3 dokumen	182.101.912	100,00	98,18
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	5 rumusan	210.339.550	5 rumusan	210.274.250	100,00	99,97
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	10.636.550	1 laporan	10.513.600	100,00	98,84

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 laporan	85.163.900	1 laporan	84.603.196	100,00	99,34
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3 dokumen	246.671.485	3 dokumen	244.766.997	100,00	99,23
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	5 rumusan	215.280.000	5 rumusan	213.751.400	100,00	99,29
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 laporan	12.894.000	1 laporan	12.576.900	100,00	97,54
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	1 laporan	19.396.050	1 laporan	18.876.350	100,00	97,32

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 dokumen	4.303.915.448	3 dokumen	3.965.924.125	100,00	92,15
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3 dokumen	209.539.118	3 dokumen	206.909.750	100,00	98,75
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	5 rumusan	219.500.000	5 rumusan	219.078.200	100,00	99,81
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	13.599.400	1 laporan	13.196.000	100,00	97,03

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 laporan	3.552.003.630	1 laporan	3.224.071.383	100,00	90,77
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3 dokumen	194.541.200	3 Dokumen	190.044.792	100,00	97,69
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	5 rumusan	86.313.250	5 rumusan	85.114.950	100,00	98,61
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 laporan	8.505.800	1 Laporan	8.063.150	100,00	94,80

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan	19.913.050	1 Laporan	19.445.900	100,00	97,65

Catatan : *Sub kegiatan yang dihilangkan dalam DPA Perubahan TA 2022

3.3. Kendala dan Permasalahan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 secara umum tidak menemui kendala yang berarti, meskipun Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi pandemi wabah virus covid-19 yang menyebabkan adanya rasionalisasi anggaran. Namun jika dilihat secara subkegiatan, berdasarkan Tabel 3.5 Realisasi Serapan Anggaran Per Sub Ksegiatan Tahun 2021, masih terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasi anggarannya kurang dari 95%, yaitu :

1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan realisasi sebesar 92,33%
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan realisasi sebesar 90,60 %
3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dengan realisasi sebesar 90.77 %
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan realisasi sebesar 94,80 %
5. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan realisasi anggaran sebesar 92,49 %.
6. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi sebesar 93,02 %

Serapan yang rendah tersebut disebabkan beberapa hal yaitu:

- a. Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat.
- b. Efisiensi belanja perjalanan dinas.
- c. Sisa pengadaan barang dan jasa.
- d. Sisa belanja jasa pelayanan umum kantor dan belanja pemeliharaan barang milik daerah yang disebabkan standar harga yang relatif tinggi pada Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

3.4. Penghargaan Tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat ikut menunjang keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meraih penghargaan Terbaik I Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tingkat Provinsi pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)

Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan salah satu bentuk evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas yang bertujuan untuk memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi terbaik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pencapaian, dan inovasi pembangunan di daerah. Keberhasilan ini menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas dokumen perencanaan, peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan pembangunan yang ditunjukkan dengan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dan peningkatan dalam pencapaian sasaran pembangunan, serta kemampuan daerah dalam berinovasi guna mewujudkan sasaran pembangunan yang diharapkan.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Didalamnya diuraikan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan dalam bentuk capaian target sasaran strategis, capaian target kinerja keuangan dan capaian target program dan kegiatan oleh masing-masing bidang yang ada di lingkup Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun anggaran 2021. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran yang diturunkan kedalam 2 (dua) indikator kinerja telah berhasil dicapai dengan kategori baik. Hal ini dapat diartikan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah telah berhasil menjaga kesesuaian antar dokumen perencanaan (Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD, serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS).
2. Pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan melalui APBD Tahun Anggaran 2021 pada masing-masing bidang telah berjalan dengan baik, dari 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 73 (tujuh puluh tiga) subkegiatan yang dilaksanakan, realisasi fisik mencapai 100% dan keuangan mencapai Rp. 22.543.092.512,- atau sebesar 97,34%, dari pagu anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 23.158.801.521,-.
3. Pada tahun 2021 Bappeda Provinsi Sumatera Barat meraih capaian prestisius sebagai terbaik I (pertama) pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) untuk kategori Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Kementrian PPN/Bappenas, hal ini bukti prestasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan mencapai target-target pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

4.2.Rekomendasi

Secara umum, pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat lebih baik lagi. Hal-hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan tiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) oleh masing-masing bidang pelaksana yang menjadi pelaksana teknis pada setiap indikator kinerja tersebut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
2. Melakukan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sejalan dengan rencana penganggaran

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2021 ini diharapkan dapat menyajikan keseluruhan capaian kinerja di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan ini masih belum sempurna. Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2021 ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan dapat menjadi acuan bagi perbaikan kinerja di tahun berikutnya.